

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

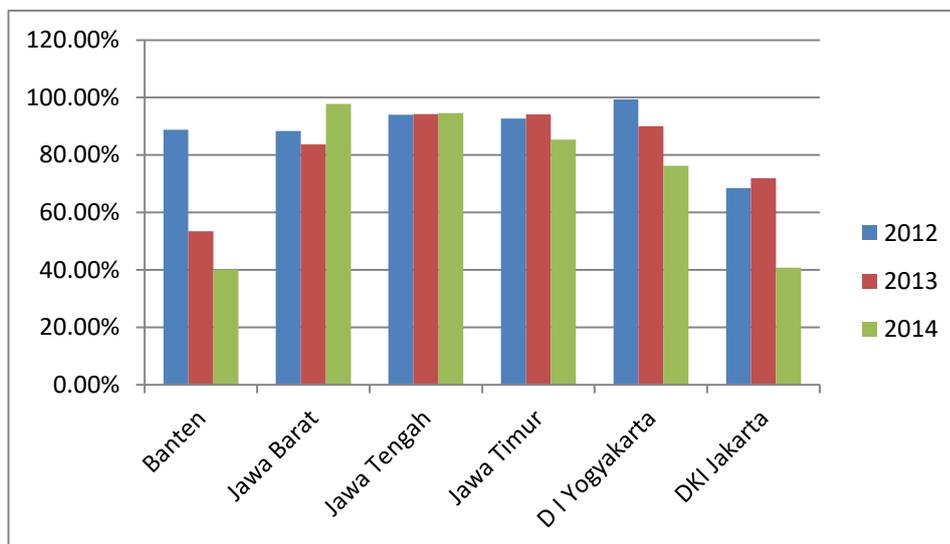
Pada penelitian ini, objek penelitian yang digunakan adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang ada di Pulau Jawa, yang letaknya diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Timur dan Jawa Barat. Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Berdasarkan data sensus penduduk yang dilaksanakan pada tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 33.270.207 jiwa.

Selain dilihat dari segi kependudukan, Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang melimpah di sektor pariwisata, sumber daya, dan industry di setiap kabupaten dan kota. Apabila potensi ini dimanfaatkan dengan baik akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan meningkatkan pengeluaran belanja daerah. Untuk itu, perlu adanya peranan penting pemerintah daerah dalam menggali potensi dan mengelola keuangan daerah. Dengan adanya pemerintah daerah diharapkan pemerintah daerah memiliki kendali dalam segi keuangan.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah maka daerah tersebut harus memaksimalkan potensi yang dimiliki. Pendapatan daerah dimanfaatkan untuk kebutuhan belanja daerah seperti belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Pada tahun 2012-2014 Belanja Modal Provinsi Jawa tengah mengalami peningkatan dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2012 sebesar 94% dan mengalami peningkatan pada Tahun 2013 sebesar 94,30% kemudian pada Tahun 2014 meningkat menjadi 94,60%. Berikut ini akan disajikan tabel Belanja Modal Pulau Jawa.

Gambar 1.1

Belanja Modal Pulau Jawa Tahun 2012 – 2014



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan grafik diatas bahwa belanja modal Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya dibandingkan dengan provinsi lain yang cenderung penurunan.

Tabel 1.1

Perbandingan Belanja Modal

Provinsi	2012	2013	2014	Rata-rata
Banten	88.80 %	53.50 %	40.10 %	60.8%
Jawa Barat	88.80 %	83.70 %	97.80 %	90.1%
Jawa Tengah	94.00 %	94.30 %	94.60 %	94.3%
Jawa Timur	92.70 %	94.20 %	85.40 %	90.8%
D I Yogyakarta	99.40 %	90.00 %	76.30 %	88.6%
DKI Jakarta	68.50 %	71.90 %	40.80 %	60.4%

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa pada tahun 2012-2014 penyerapan belanja modal tertinggi ditempati oleh Provinsi Jawa tengah dengan rata-rata sebesar 94.3%

1.2. Latar Belakang Penelitian

Berlandaskan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dengan adanya UU No.32 tahun 2004, Implementasi Otonomi Daerah harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan. Tujuan Otonomi Daerah diharapkan setiap daerah otonom mampu memberikan kesejahteraan bagi publik, meningkatkan pelayanan khususnya di sektor publik dan mampu mengelola keuangan daerah secara optimal. Dengan demikian peranan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut sangat penting. Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus terus ditingkatkan, selaras dengan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

Sejak diberlakukan reformasi keuangan daerah dan sejalan dengan implementasi otonomi daerah, sejumlah daerah tertentu tidak mampu mandiri dalam membiayai daerahnya sendiri akibat kapasitas fiskal yang rendah. Hal ini tentunya berdampak pada pelaporan keuangan pemerintah daerah yang harus disajikan dan diperiksa setiap tahun. Berikut ini tabel 1.2 Tingkat Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.2
Tingkat Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota
Di Provinsi Jawa Tengah

no.	Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli daerah	Transfer pemerintah pusat+ provinsi dan pinjaman	PAD/TPD	kriteria
		2015	2015		
1	Kota Salatiga	105,918,010.00	682,519,026.00	15.52%	kurang
2	Kota Pekalongan	150,191,892.00	820,680,470.00	18.30%	kurang
3	Kabupaten Tegal	255,732,920.00	1,968,032,415.00	12.99%	kurang
4	Kabupaten Pemalang	190,241,690.00	1,761,811,158.00	10.80%	kurang
5	Kabupaten Semarang	238,219,647.00	1,549,256,853.00	15.38%	kurang
6	Kabupaten Magelang	200,653,763.00	1,786,409,366.00	11.23%	kurang
7	Kabupaten Wonogiri	174,557,497.00	1,807,656,739.00	9.66%	kurang
8	Kabupaten Sragen	195,290,956.00	1,720,219,040.00	11.35%	kurang
9	Kabupaten Kudus	244,741,959.00	1,617,763,897.00	15.13%	kurang
10	Kabupaten Cilacap	280,688,357.00	2,376,963,462.00	11.81%	kurang
11	Kabupaten Banyumas	385,677,609.00	2,479,485,084.00	15.55%	kurang
12	Kabupaten Purbalingga	180,202,572.00	1,467,875,239.00	12.28%	kurang
13	Kabupaten Banjarnegara	135,711,381.00	1,479,807,750.00	9.17%	kurang
14	Kabupaten Kebumen	173,507,685.00	1,972,960,045.00	8.79%	kurang
15	Kabupaten Purworejo	180,291,769.00	1,579,335,612.00	11.42%	kurang
16	Kabupaten Wonosobo	145,151,252.00	1,347,351,963.00	10.77%	kurang
17	Kabupaten Boyolali	221,873,999.00	1,791,989,006.00	12.38%	kurang
18	Kabupaten Klaten	156,097,966.00	1,956,660,336.00	7.98%	kurang
19	Kabupaten Sukoharjo	235,933,524.00	1,640,833,639.00	14.38%	kurang
20	Kabupaten Karanganyar	181,061,011.00	1,615,471,166.00	11.21%	kurang
21	Kabupaten Pekalongan	238,975,251.00	1,586,521,597.00	15.06%	kurang
22	Kabupaten Grobogan	208,438,724.00	1,827,743,162.00	11.40%	kurang
23	Kabupaten Blora	130,000,000.00	1,577,588,333.00	8.24%	kurang
24	Kabupaten Rembang	182,191,199.00	1,344,291,653.00	13.55%	kurang
25	Kabupaten Pati	243,577,485.00	1,880,328,796.00	12.95%	kurang
26	Kabupaten Jepara	193,119,187.00	1,612,976,397.00	11.97%	kurang
27	Kabupaten Demak	206,243,460.00	1,530,744,804.00	13.47%	kurang
28	Kabupaten Temanggung	152,160,724.00	1,313,200,496.00	11.59%	kurang
29	Kabupaten Kendal	171,179,320.00	1,578,521,310.00	10.84%	kurang
30	Kabupaten Batang	149,106,696.00	1,188,635,555.00	12.54%	kurang
31	Kabupaten Brebes	262,781,937.00	2,136,244,950.00	12.30%	kurang
32	Kota Magelang	131,399,601.00	712,647,908.00	18.44%	kurang
33	Kota Surakarta	341,533,937.00	1,524,631,790.00	22.40%	sedang
34	Kota Semarang	1,052,732,041.00	3,043,157,080.00	34.59%	cukup
35	Kota Tegal	229,575,381.00	837,590,993.00	27.41%	sedang
	rata rata			13.80%	kurang

Berdasarkan Tabel 1.1, rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tabanan selama periode tahun anggaran 2015 adalah 13,80 % sehingga

diklasifikasikan menurut kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kurang. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun anggaran 2015 memiliki kemandirian keuangan yang kurang sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

Halim (2001) menegaskan bahwa tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah. Penegasan ini menunjukkan bahwa bagi daerah-daerah yang memiliki celah fiskal yang tinggi perlu memperkuat struktur anggaran belanjanya, ini bukan berarti daerah-daerah yang celah fiskal yang rendah tidak perlu memperkuat struktur belanja. Dengan memperkuat struktur belanja daerah dapat meningkatkan kepercayaan publik. Hal ini penting karena anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas pembangunan daerah merupakan anggaran publik. Keadaan ini dapat dicapai jika pemerintah daerah mengelola keuangan dengan baik. Realisasi Anggaran Belanja pemerintah dipastikan akan mendorong perekonomian daerah. Munandar (2012) menyatakan Realisasi Anggaran adalah seluruh kegiatan pelaksanaan anggaran yang juga meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan budget. Tujuan Realisasi Anggaran ini adalah untuk memberikan feedback serta follow up agar di periode-periode berikutnya bisa berjalan dengan baik. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah, melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung (permendagri nomor 25 tahun 2009), merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi daerah. Salah satu belanja daerah yang digunakan oleh Pemerintah Daerah adalah Belanja Modal. Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional

dan biaya pemeliharaan. Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Belanja Modal ini di dasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi Belanja Modal adalah Pendapatan Asli Daerah. Jika PAD suatu daerah meningkat, maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran Belanja Modal juga akan mengalami suatu peningkatan diantaranya pembangunan infrastruktur untuk publik. Hal ini sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang di terima, sehingga Pemerintah Daerah ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah harus menggali Pendapatan Asli Daerah yang sebesar-besarnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, maka Belanja Modal juga akan semakin tinggi. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, maka pemerintah daerah harus mengalokasikan Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apabila pemerintah daerah tersebut dapat mengembangkan potensi-potensi sumber keuangan dengan optimal, maka pendapatan suatu daerah akan meningkat, jumlah pengangguran mengalami penurunan dan akan meningkatkan pertumbuhan

ekonomi juga sehingga kesejahteraan publik terjamin dengan bertambahnya infrastruktur dan sarana prasarana.

Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal dengan baik. Namun pada kenyataan jumlah PAD yang tidak sebanding dengan pengeluaran Belanja Modal mengakibatkan PAD belum bisa memenuhi Belanja Modal sehingga perlu dana bantuan dari pusat yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Berikut ini perbandingan realisasi Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat tabel 1.1.

Tabel 1. 1

Realisasi Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 - 2015

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal
2013	Rp 6.092.969.558	Rp 7.352.706.541
2014	Rp 8.862.516.800	Rp 9.032.392.801
2015	Rp 7.924.760.402	Rp 9.391.988.196

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 sampai 2015 terdapat fenomena yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah diantaranya terjadi naik turunnya Pendapatan Asli Daerah sedangkan Belanja Modal mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 6.092.969.558 lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran Belanja Modal sebesar Rp 7.352.706.541. Pada tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 8.862.516.800 mengalami peningkatan namun Belanja Modal yang dikeluarkan lebih besar dari Pendapatan Asli daerah yang dihasilkan sebesar Rp 9.032.392.801. Hal yang sama terjadi pada tahun 2015 Belanja Modal lebih besar yaitu Rp 9.391.988.196 dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah yang mengalami penurunan sebesar Rp 7.924.760.402. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sampai 2015 Belanja Modal lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan

Asli Daerah yang dihasilkan sehingga Pendapatan Asli Daerah belum cukup dalam memenuhi Belanja Modal. Hal ini mengakibatkan peranan atas Pendapatan Asli Daerah terhadap kegiatan daerah masih kurang yang mana seharusnya PAD menjadi sumber utama untuk membiayai kegiatan daerah seperti Belanja Modal. Salah satu penyebab rendahnya PAD adalah ketidakmampuan daerah dalam menggali potensi pajaknya. Akibatnya bantuan dana dari pemerintah pusat berupa DAU dan DAK menjadi andalan. Daerah yang merasa kondisi fiskalnya kurang baik berharap kucuran transfer dana dari pemerintah pusat dapat mencukupi kebutuhan daerah atas kekurangan PAD. Pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan dana perimbangan. Dengan adanya transfer dana dari Pemerintah Pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya untuk membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik. Dengan demikian maka dibutuhkan dana bantuan dari pemerintah pusat yaitu dana perimbangan atas kurangnya Pendapatan Asli Daerah dalam memenuhi Belanja Modal. Tujuan dari dana perimbangan ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh negeri (Simanjuntak dalam Sidik et al, 2002).

Adanya transfer dana ini bagi Pemda merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri yaitu PAD. Namun kenyatannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah. Harapan pemerintah pusat dana transfer tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah bahwa Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi fiskal. Untuk mewujudkan itu, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja modal. Sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai Belanja Modal tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD-nya masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD. Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya (Ardhani 2011). Hasil penelitian Arwati dan Hadiati (2013) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja modal. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) yang menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) mengacu kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arwati dan Hadiati (2013) menunjukkan bahwa Dana Alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal karena Dana Alokasi Umum (DAU) yang selama ini diterima daerah tidak digunakan untuk membangun daerah yang terlihat dalam pengalokasian anggaran belanja modal. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Permatasari dan Mildawati (2016) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal yang berarti semakin tinggi Dana Alokasi Umum (DAU)

yang diterima oleh suatu daerah makin semakin besar pula belanja modal yang dapat dialokasikan oleh daerah tersebut.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan dan Daerah, menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup. Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Mildawati (2016) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal yang berarti semakin tinggi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh suatu daerah maka semakin besar pula belanja modal yang dapat dialokasikan oleh daerah tersebut. Berbeda dengan penelitian lainnya, penelitian yang dilakukan oleh Santosa dan Rofiq (2013) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal disebabkan karena dalam suatu daerah cenderung untuk membiayai Belanja Modal lebih banyak bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) daripada dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal (Studi empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2015)”**.

1.3. Perumusan Masalah

PP Nomor 24 Tahun 2005 menyatakan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Belanja Modal sebaiknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif

seperti pembangunan infrasktruktur dan aktivitas pembangunan lainnya yang berguna untuk kepentingan publik dan kelancaran tugas pemerintahan.

Namun pada kenyataanya terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah sedangkan Belanja modal mengalami peningkatan seiring kebutuhan pembangunan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan Belanja Modal perlu bantuan dari pusat berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

1.4. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Realisasi Anggaran Bealanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2015?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara simultan terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial dari variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus :
 - a. Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal?
 - b. Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal?
 - c. Dana Alokasi Khusus secara parsial terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Realisasi Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2014-2015.

2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial :
 - a. Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal.
 - b. Dana Alokasi Umum terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal.
 - c. Dana Alokasi Khusus terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal.

1.6. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberi manfaat berbagai pihak, yaitu:

1.6.1 Aspek Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akan menambah wawasan mengenai besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Realisasi Anggaran Belanja Modal jika dilihat dari laporan realisasi anggarannya serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya. Sedangkan bagi peneliti, penelitian ini sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Realisasi Belanja Modal.

1.6.2. Aspek Praktis

Bagi Pemerintah

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran dalam memanfaatkan anggaran Belanja Modal yang ada dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga konsep otonomi daerah terlaksana dengan tepat.
- b. Pemerintah daerah menurunkan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan.

1.7. Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Realisasi Anggaran Belanja Modal. Dalam penelitian yang mungkin dapat mempengaruhi Belanja Modal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penelitian ini akan mengkaji pengaruh secara parsial maupun simultan yang mungkin dapat mempengaruhi Belanja Modal.

1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di website resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Objek penelitian ini adalah Provinsi Jawa Tengah. Data dalam penelitian diperoleh dari website resmi BPS (www.bps.go.id).

1.7.3. Waktu dan Periode Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah pada periode 2014 sampai dengan tahun 2015.

1.8. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas setiap bab. Sistematika penulisan penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini merupakan bagian yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian dan mendukung solusi permasalahan, serta kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian sebagai dugaan sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisis uraian mengenai karakteristik penelian, alat pengumpulan data, tahapan pelaksana penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, teknis analisis data serta pengujian hipotesis.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian, mencakup analisis responden terhadap variabel penelitian, analisis statistik serta analisis pengaruh variabel.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran peneliti baik dari segi aspek teoritis maupun praktis.